

Kebijakan Angela Merkel dalam Mengatasi Krisis Pengungsi di Eropa tahun 2015

Ersadio Rahman Wicaksono

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Indonesia
ersadiowicaksono@gmail.com

Diserahkan: 2 Maret 2018; diterima: 23 Agustus 2018

ABSTRAK

Tahun 2015 menjadi tahun terburuk dalam sejarah krisis pengungsi. Sejumlah 19.5 juta orang menjadi pengungsi di seluruh dunia. Kawasan Eropa menjadi tujuan utama bagi para pengungsi untuk mendapatkan perlindungan. Angela Merkel, Kanselir Jerman, memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan *Open Door* guna merespon banyaknya jumlah pengungsi yang berdatangan. Respon Angela Merkel cukup signifikan mengingat beberapa negara Eropa lainnya seperti Perancis dan Hungaria justru berusaha untuk menutup negaranya bagi para pengungsi. Sensitivitas gender dan feminisme terlihat cukup esensial sehingga dapat memengaruhi Angela Merkel dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Untuk itu, tulisan ini membahas mengenai bagaimana *agenda-setting* berbasis gender dilakukan oleh Angela Merkel.

Kata kunci: open door policy, krisis pengungsi, Angela Merkel, gender sensitivity, feminisme.

ABSTRACT

2015 is the worst year in the history of the refugee crisis. About 19,5 million people are refugees worldwide. The European region is the main destination for refugees to get protection. Angela Merkel, German chancellor, decided to issue an Open Door policy to respond the large number of refugees arriving. Angela Merkel's response is quite significant considering that other European countries such as France and Hungary are trying to close their countries to refugees. Gender sensitivity and feminism perspective appear essential enough to influence Angela Merkel in issuing the policy. For this reason, this paper discusses how gender-based agendas are conducted by Angela Merkel.

Keywords: open door policy, refugee crisis, Angela Merkel, gender sensitivity, feminism.

PENDAHULUAN

Tahun 2015, negara-negara di kawasan Eropa dihadapkan pada adanya gelombang pengungsi yang cukup besar terutama berasal dari daerah konflik seperti Syria, Irak, dan Afghanistan. Fenomena tersebut kemudian mendapatkan respon yang cukup berbeda di antara negara-negara kawasan Eropa.

Tentunya respon-respon tersebut didasarkan pada berbagai bentuk alasan. Angela Merkel, Kanselir Jerman, memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan membuka Jerman atau dikenal dengan kebijakan *Open Door* sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap para pengungsi yang telah tiba di Eropa dan Jerman khususnya.

Engler (2016) menjelaskan bahwa jumlah pengungsi yang masuk ke Jerman cenderung mengalami peningkatan dalam periode lima tahun terakhir. Merujuk pada kondisi tersebut, yang seharusnya terjadi adalah Jerman dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masuk dikarenakan sudah menampung cukup banyak pengungsi.

Secara lebih lanjut, Engler (2016) menjelaskan bahwa sejumlah 441.889 permohonan suaka telah diajukan oleh pengungsi pada tahun 2015. Selain itu, Lee (2015) menyatakan bahwa dalam konteks pengajuan aplikasi untuk perlindungan suaka, Jerman menjadi negara terbesar di antara negara-negara Uni Eropa lainnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2014, dalam total 625.920 permohonan yang masuk secara keseluruhan di Uni Eropa, tercatat bahwa Jerman menerima sejumlah 202.645 aplikasi permohonan suaka. Lee (2015) juga menjelaskan bahwa apabila dibandingkan dengan Italia, Jerman tercatat menerima tiga kali lipat aplikasi permohonan suaka yakni sejumlah 64.625 aplikasi permohonan suaka dan enam kali lipat apabila dibandingkan dengan Britania Raya dengan jumlah 31.745 aplikasi permohonan.

Tercatat bahwa pada tahun 2015 Jerman menerima sejumlah 800.000 pengungsi yang sejatinya merupakan korban perang dan konflik. Jumlah pengungsi tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Tentunya, dengan menerima pengungsi dalam jumlah yang cukup besar terdapat berbagai bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Angela Merkel dan pemerintah Jerman terhadap para pengungsi untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan. Penerimaan pengungsi yang dilakukan oleh Angela Merkel ini menjadi sorotan di antara negara-negara Uni Eropa lainnya. Namun

demikian, Angela Merkel berupaya untuk mempertahankan kebijakan yang telah dikeluarkannya.

Sensitivitas gender dan feminisme terlihat cukup esensial dalam memahami dikeluarkannya kebijakan *Open Door* oleh Angela Merkel guna memberikan respon terhadap fenomena krisis pengungsi di Eropa. Hal ini terlihat dari adanya upaya maksimal yang dilakukan oleh Angela Merkel untuk membantu para pengungsi. Dilansir dalam BBC (2015) bahwa Merkel mendorong negara-negara lain di Uni Eropa untuk dapat memberikan bantuan terhadap para pengungsi yang tiba di Eropa. Secara lebih lanjut, Angela Merkel (2015) dalam konferensi pers pada 31 Agustus 2015 menyatakan bahwa upaya yang dilakukannya untuk mengatasi krisis pengungsi di Eropa berdasarkan adanya prinsip untuk menghargai harga diri manusia secara individual, tanpa melihat latar belakang para pengungsi tersebut. Berbagai bentuk protes yang menyudutkan keberadaan para pengungsi di Jerman turut menjadi perhatian Angela Merkel sebagai bentuk tanggung jawab atas dikeluarkannya kebijakan *Open Door*. Hal tersebut dijelaskan oleh Mc Gregor (2015) bahwa Merkel menyatakan tidak ada toleransi untuk siapapun yang mempertanyakan martabat orang lain. Terkait dengan hal ini, negara-negara Eropa lainnya justru memiliki respon yang berbeda terhadap fenomena krisis pengungsi tersebut.

Respon berbeda kemudian ditunjukkan oleh Hungaria. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tidak diterima oleh negara Eropa Tengah dan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, menjadi salah satu pihak yang cukup serius dalam memberikan kritik terkait hal tersebut (Ivanova, 2017). Ivanova (2017)

menjelaskan bahwa Viktor Orban menentang adanya sistem kuota untuk alokasi pengungsi yang diajukan oleh Brussels, dan meminta adanya percepatan integrasi Eropa untuk wilayah Balkan Barat. Perancis menjadi negara berikutnya yang tidak dapat memberikan perlindungan pengungsi. Muzalevskaya (2016) menjelaskan bahwa pemerintah Perancis, di bawah pemerintahan Presiden Francois Hollande, justru menunjukkan sikap waspada dalam memberikan perhatian terhadap fenomena krisis pengungsi di Eropa tahun 2015. Tentunya, hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Pada tahun yang sama, Presiden Perancis menghadapi berbagai bentuk tentangan dari kelompok oposisi domestik dalam *National Front* dan sedang menghadapi krisis legitimasi (Muzalevskaya, 2016). Respon tersebut tentunya bertolak belakang dengan rekam jejak Perancis terkait dengan kebijakan yang justru cenderung ramah dengan imigrasi. Dalam merespon krisis pengungsi di Eropa tahun 2015, Perancis hanya menampung 30.000 pengungsi.

Terlihat bahwa Angela Merkel memiliki peran dan pengaruh yang cukup besar terhadap dikeluarkannya kebijakan *Open Door* tahun 2015. Untuk itu, terdapat urgensi dalam melihat aspek-aspek sensitivitas gender dan feminisme yang dimiliki oleh Angela Merkel sehingga dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap dikeluarkannya kebijakan *Open Door*. Selain itu, pada penelitian sebelumnya mengenai kebijakan *Open Door* yang dikeluarkan oleh Angela Merkel belum melihat pada aspek-aspek sensitivitas gender dan feminisme. Schmid (2016) dalam penelitiannya menggunakan perspektif konstruktivis dan struktural realis. Penelitian tersebut kemudian

menunjukkan bahwa kebijakan *Open Door* yang dikeluarkan oleh Angela Merkel nyatanya mengacu pada identitas moral yang dimiliki oleh Jerman. Sehingga pada penelitian ini berupaya untuk memberikan sudut pandang berbeda dalam melihat respon Angela Merkel mengenai fenomena krisis pengungsi di Eropa tahun 2015 melalui kebijakan *Open Door*.

PEMBAHASAN

Krisis Pengungsi di Eropa tahun 2015

Dijelaskan dalam *European Stability Initiative* (2017), data statistik menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2015 jumlah populasi penduduk yang melakukan perpindahan tempat, secara global, mencapai 65,3 juta jiwa. Perpindahan yang dilakukan tentunya dapat didasarkan pada beberapa hal seperti adanya perang, konflik, maupun bencana alam sehingga “memaksa” mereka untuk berpindah tempat dan mencari perlindungan di tempat lainnya. Dalam hal ini, kawasan Eropa kemudian menjadi tujuan bagi para pengungsi untuk mendapatkan perlindungan. Merujuk pada jumlah perpindahan penduduk yang cukup besar, fenomena krisis pengungsi tahun 2015 menjadi yang terbesar dalam sejarah dunia setelah banyaknya korban akibat Perang Dunia II. Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam jumlah total yang telah disebutkan terdiri dari 16,1 juta pengungsi yang meninggalkan negaranya; 5,2 juta pengungsi Palestina baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Palestina yang terdaftar dalam UNRWA. Tidak hanya itu, sejumlah 3,2 juta aplikasi pencari suaka yang belum juga diputuskan statusnya turut menyumbangkan angka dalam krisis pengungsi tersebut. Sejumlah 40,8 juta IDP (*Internally Displaced Persons*) juga menyumbangkan angka

dalam krisis pengungsi tahun 2015 dan angka IDP terus mengalami peningkatan sejak tahun 2011 (*European Stability Initiative, 2017*).

Jerman kemudian menjadi negara Uni Eropa yang menjadi tujuan para pengungsi maupun para pencari suaka pada tahun 2015. Tercatat bahwa Jerman menjadi tujuan bagi 890.000 para pencari suaka pada tahun 2015. Namun, dalam hal ini, otoritas Jerman hanya mampu menerima sekitar 441.900 pencari suaka. Selibhnya, akan diproses lebih lanjut pada tahun 2016. Berikut adalah data mengenai sepuluh negara yang menerima para pencari suaka pada tahun 2015:

Tabel I. Data Negara Penerima Suaka tahun 2015

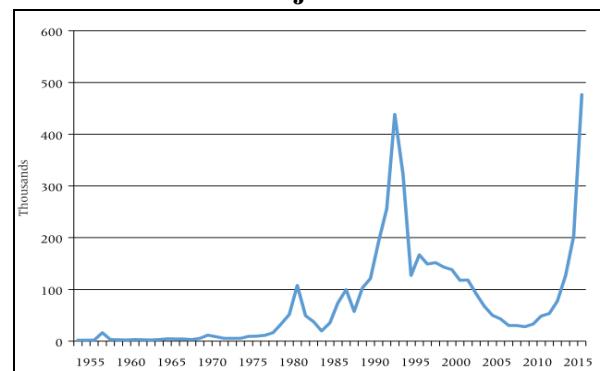
Country	Number of Individual Claims	Share
Germany*	441.900	22%
USA	172.700	8,5%
Sweden	156,400	7,7%
Russia**	152,500	7.5 %
Turkey***	133,300	6.5 %
Austria	85,800	4.2 %
Italy	83,200	4.1 %
Hungary****	74,200	3.6 %
France	74,200	3.6 %
South Africa	62,200	3.1 %
Other	603,600	30 %
Total	2,040,000	100 %

Sumber: UNHCR dalam European Stability Initiative, 2017.

Dilansir dalam sumber yang berbeda, tercatat bahwa pada tahun 2015 sekitar 995.000 aplikasi permohonan suaka diajukan ke negara-negara Uni Eropa. Jumlah tersebut merupakan dua kali lipat dari kondisi pada tahun 2014. Sepanjang sejarah Jerman, tahun 2015 menjadi tahun krusial bagi Jerman dalam menerima pengungsi maupun para pencari suaka

(Juran & Broer, 2017). Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik I. Data Penerimaan Pengungsi oleh Jerman sejak 1995-2015

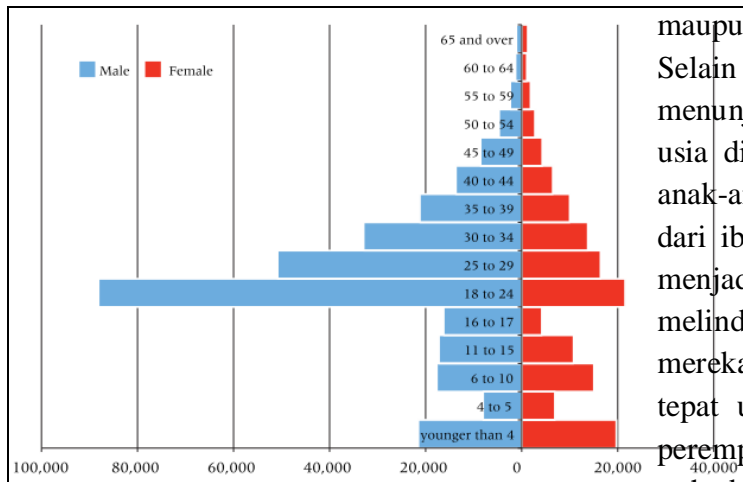


Sumber: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016). Das Bundesamt in Zahlen 2015. Asyl. Nürnberg, Dalam Juran dan Broer (2017).

Melalui grafik tersebut di atas, dapat dilihat bahwa aplikasi permohonan suaka mencapai tingkat yang sama di awal 1990an sebagai respon terhadap perang di wilayah negara-negara bekas Yugoslavia, namun pada tahun 2008 jumlahnya telah menurun tajam. Sejak itu, grafik permohonan aplikasi di Jerman mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2015 yakni sekitar 476.000 jiwa mengajukan permohonan suaka (Juran & Broer, 2017). Dalam jumlah tersebut, perlu untuk diketahui pula mengenai rasio perempuan dan laki-laki yang menjadi pengungsi atau pencari suaka. Hal tersebut menjadi penting mengingat kelompok perempuan menjadi pihak yang cukup rawan ketika menjadi pengungsi atau pencari suaka. Rawannya kondisi perempuan ketika menjadi pengungsi atau pencari suaka adalah karena banyak kemungkinan mengalami tindakan pelecehan seksual dan diskriminasi atas dasar seksual atau *sexual and gender based violence*. Berikut adalah

grafik yang menunjukkan rasio perbandingan kelompok perempuan dan laki-laki ketika terjadi krisis pengungsi di Eropa pada tahun 2015 yang tiba di Jerman:

Grafik II. Rasio Perbandingan Pengungsi Laki-laki dan Perempuan di Jerman



Sumber: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016). *Das Bundesamt in Zahlen 2015. Asyl. Nürnberg*

Dalam grafik tersebut, terlihat bahwa pengungsi atau para pencari suaka didominasi oleh penduduk dengan rentang usia 18-34 tahun. Pada tahun 2015, sekitar 71% yang mengajukan aplikasi perlindungan tergolong dalam usia di bawah 30 tahun, dan 31% di antaranya di bawah usia 18 tahun, serta kurang dari 1% adalah pemohon yang mencapai usia lebih dari 54 tahun (Juran & Broer, 2017). Terkait dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa kelompok laki-laki mencapai dua per tiga atau sekitar 69,2% dari total seluruh pemohon perlindungan di Jerman. Sementara kelompok perempuan hanya sekitar 7,3% dari Pakistan dan 49,0% dari Serbia (Juran & Broer, 2017). Mengacu pada data tersebut, terlihat bahwa

kelompok laki-laki menjadi kelompok mayoritas dalam krisis pengungsi di Eropa. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan kemungkinan terjadinya pelecehan seksual terhadap kelompok perempuan yang menjadi minoritas. Pelecehan tersebut dapat terjadi ketika kelompok perempuan melakukan perpindahan dari negara asalnya menuju tempat yang lebih aman maupun ketika tiba di negara tujuan. Selain itu, dalam data tersebut juga menunjukkan adanya kelompok anak-anak usia dini. Dalam hal ini, secara kultural, anak-anak akan menjadi tanggung jawab dari ibu sehingga beban perempuan akan menjadi lebih berat yakni untuk melindungi diri sendiri maupun anak-anak mereka. Untuk itu, diperlukan respon yang tepat untuk dapat melindungi kelompok perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap kasus pelecehan seksual, diskriminasi, maupun perdagangan manusia.

Respon Angela Merkel terhadap Krisis Pengungsi di Eropa tahun 2015

Krisis pengungsi yang melanda kawasan Eropa dan berdampak pada negara-negara Uni Eropa tentunya mendapatkan respon yang cukup tajam dan berbeda. Respon berbeda ditunjukkan oleh Angela Merkel selaku Kanselir Jerman. Pada tanggal 31 Agustus 2015, Angela Merkel menyatakan “*Wir schaffen das*” atau “*We Can Do It.*” Hal tersebut menunjukkan keterbukaan Jerman bagi para pengungsi maupun para pencari suaka. Dalam hal ini Merkel memberikan respon yang cukup positif terhadap besarnya gelombang pengungsi di kawasan Eropa maupun yang mencari perlindungan di Jerman. Dijelaskan oleh Giovanna dell’Orto (2017) bahwa Merkel kemudian menjadi ikon keterbukaan dalam krisis

pengungsi tersebut. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pemerintah negara lain yang justru menutup perbatasan negara untuk para pengungsi maupun pencari suaka.

Pada tanggal 5 September 2015 menjadi momen krusial bagi Angela Merkel, Jerman beserta masyarakat Jerman, dan para pengungsi yang tiba di Eropa. Hal tersebut dikarenakan pada tanggal tersebut Merkel setuju untuk membuka perbatasan Jerman guna memberikan perlindungan bagi pengungsi maupun para pencari suaka. Hal tersebut menjadi respon yang cukup berbeda mengingat banyaknya laporan terkait penyiksaan terhadap pengungsi yang diselundupkan melalui sebuah truk yang ditinggalkan di wilayah Austria. Tentunya hal ini dapat mengambil hati sebagian besar masyarakat Jerman. Tidak hanya itu, respon Angela Merkel tersebut ditanggapi secara positif oleh berbagai elemen masyarakat Jerman seperti komunitas gereja, pelajar, sekolah, orang tua, sektor bisnis, dan anggota serikat buruh (Giovanna dell'Orto, 2017). Secara spontan, kelompok-kelompok relawan di Jerman memberikan respon yang cukup positif dengan mengumpulkan dan menyediakan makanan, selimut, mainan anak-anak, berbagai bentuk kebutuhan, dan dukungan emosional untuk para pengungsi maupun pencari suaka.

Tidak hanya itu, dijelaskan oleh Mushaben (2017) bahwa Angela Merkel menjadi pemimpin pertama di Uni Eropa untuk menyerukan adanya solidaritas dan distribusi kuota secara reguler di antara negara-negara anggota Uni Eropa walaupun hal tersebut mendapatkan perlawanan dari pemerintah Inggris. Namun, upaya untuk membuka perbatasan negara Jerman masih terus dilakukan oleh Angela Merkel. Dalam perkembangannya,

pada akhir tahun 2015 terdapat lebih dari 14.000 pusat relawan di seluruh wilayah Jerman (Mushaben, 2017). Respon yang muncul dari masyarakat Jerman sendiri cukup beragam, ada yang mendukung dan ada pula yang menolak kehadiran para pengungsi maupun pencari suaka di Jerman. Bentuk-bentuk penolakan tersebut berupa aksi ujaran kebencian dan demonstrasi anti-imigran. Dalam hal ini, Angela Merkel memberikan respon yang cukup keras dengan menentang berbagai bentuk diskriminasi dan demonstrasi anti-imigran terhadap pengungsi maupun pencari suaka di Jerman (Mushaben, 2017). Terlihat bahwa Angela Merkel selaku Kanselir Jerman memiliki upaya yang cukup keras guna melindungi para pengungsi dan pencari suaka di Jerman. Angela Merkel memanfaatkan posisinya sebagai Kanselir Jerman untuk dapat merumuskan berbagai bentuk kebijakan guna memberikan respon terhadap krisis pengungsi di Eropa tahun 2015.

Upaya lainnya yang berusaha untuk dilakukan adalah dengan melakukan integrasi para pengungsi dengan pasar tenaga kerja di Jerman. Namun, hal tersebut tentunya akan menjadi proses jangka panjang. Secara lebih lanjut, Juran dan Broer (2017) menjelaskan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk gelombang pengungsi sebelumnya mencapai tingkat kepegawaian penduduk nasional Jerman. Hal tersebut merujuk pada adanya peningkatan pengangguran di antara para pengungsi dengan masa tinggal yang lebih lama di Jerman. Terkait dengan hal ini, kelompok perempuan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan kelompok laki-laki dalam pasar tenaga kerja Jerman (Juran & Broer, 2017). Data yang dilansir oleh *The Federal Office for Migration and Refugees* menunjukkan

bahwa terdapat sekitar 73% penduduk dewasa yang mengajukan suaka pada tahun 2015. Di antara jumlah tersebut, 18% persen di antaranya memiliki pendidikan pada tingkat universitas dan 20% lainnya memiliki pendidikan menengah yang lebih tinggi. Sementara, 22% tercatat hanya memiliki pendidikan dasar sebagai tingkat pendidikan tertinggi yang dapat dicapai dan terdapat 7% yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pendidikan formal (Juran & Broer, 2017). Guna mengurangi perbedaan tersebut, baik pengungsi maupun pencari suaka yang baru tiba di Jerman dapat memperoleh manfaat dari kursus integrasi, termasuk di dalamnya adalah kursus bahasa dan perbaikan.

Upaya Perlindungan terhadap Pengungsi di Jerman

Kebijakan *Open Door* yang dikeluarkan oleh Angela Merkel guna memberikan respon terhadap krisis pengungsi di Eropa tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pemerintah dan masyarakat Jerman. Hal tersebut dikarenakan seiring dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, jumlah pengungsi yang masuk ke Jerman mengalami peningkatan yang cukup pesat. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap para pengungsi yang meninggalkan negara asalnya karena konflik dan tiba di kawasan Eropa. Pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi menjadi hal yang cukup krusial untuk segera dilakukan pasca dikeluarkannya kebijakan tersebut. Tempat tinggal darurat yang sifatnya sementara menjadi kebutuhan yang cukup diperlukan oleh para pengungsi yang tiba di Jerman yang sedang menunggu proses pengajuan

aplikasi perlindungan oleh pemerintah Jerman.

Salah satu tempat yang menjadi pusat perlindungan darurat bagi para pengungsi yang tiba di Jerman adalah di kota Berlin. Kota Berlin sama halnya dengan kota-kota lainnya di Jerman, berupaya dengan maksimal untuk dapat memberikan perlindungan terhadap para pengungsi yang terus berdatangan ke Jerman. Josie Le Blond (2015) mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 40.000 pengungsi maupun pencari suaka yang telah terdaftar di Berlin pada tahun 2015. Jumlah tersebut telah mendapatkan tempat perlindungan darurat baik di sekolah-sekolah maupun gelanggang olahraga hingga penuh dapat menampung lebih banyak pengungsi hingga mencapai 4.000 orang.

Gambar I. Bandara Tempelhof untuk Tempat Penampungan Pengungsi



Sumber: UNHCR (2015)

Tidak hanya itu, pada bulan Oktober, pemerintah kota juga mengubah Bandara Tempelhof yang merupakan bekas basis udara Amerika yang digunakan oleh Aliansi Barat di Berlin selama periode Perang Dingin menjadi tempat perlindungan darurat bagi pengungsi. Bangunan tersebut memiliki luas 300.000 meter persegi dan menjadi solusi skala besar yang dapat menampung para pengungsi dalam jumlah besar pada musim

dingin (Le Blond, 2015). Bandara tersebut diklaim dapat menampung lebih dari 2.000 pengungsi maupun pencari suaka, diantaranya adalah 500 anak-anak. Selain itu, dijelaskan pula bahwa pemerintah kota Berlin juga membuka bagian-bagian terminal lainnya sehingga dapat menampung lebih dari 4.000 orang.

Ben Knight (2015) turut menyampaikan bahwa Berlin telah berupaya untuk mencari fasilitas umum lainnya guna memberikan tempat berlindung bagi para pengungsi maupun pencari suaka yang tiba di Jerman seiring dengan adanya peningkatan jumlah pengungsi yang masuk, bahkan mencapai angka 50.000 orang pada tahun 2015. Pemerintah kota Berlin juga melakukan diskusi dengan pejabat terkait untuk dapat mempermudah langkah pemerintah kota dalam melakukan aksi secara unilateral.

Sejatinya terdapat tiga tipe akomodasi yang dapat diperoleh para pengungsi maupun pencari suaka yakni jangka pendek yang masa tinggalnya hingga tiga hari, jangka menengah yang masa tinggalnya hingga tiga bulan dan jangka panjang. Dalam situasi darurat, akomodasi jangka pendek cenderung lebih banyak digunakan seperti penggunaan bangunan sekolah dan tempat olahraga untuk tempat tinggal para pengungsi maupun para pencari suaka di mana tempat-tempat tersebut digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah Jerman telah menggunakan Bandara Tempelhof sebagai tempat perlindungan terbesar bagi para pengungsi maupun pencari suaka di Jerman. Selain itu, pemerintah kota Berlin juga berupaya untuk menggunakan fasilitas umum lainnya untuk dapat menampung banyaknya pengungsi yang tiba di Jerman sebagai dampak dari

dikeluarkannya kebijakan *Open Door* oleh Angela Merkel. Namun, demikian banyaknya jumlah pengungsi maupun pencari suaka yang tiba di Jerman tidak sebanding dengan banyaknya jumlah tempat yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan bagi mereka. Organisasi eksternal seperti Global Shelter Cluster pada akhirnya diminta oleh pemerintah Jerman untuk dapat menyediakan akomodasi massa untuk penggunaan jangka pendek. Hal tersebut digunakan untuk memberikan akomodasi yang berlokasi di dekat perbatasan Austria di mana mayoritas pengungsi maupun pencari suaka tiba (Global Shelter Cluster, 2016). Hal tersebut juga dilakukan di dua tempat lainnya yakni Feldkirchen dan Erding. Pada pusat penerimaan pertama, pengungsi maupun pencari suaka mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar sekaligus proses registrasi resmi oleh pemerintah. Sejatinya, proyek ini menggunakan pendekatan yang cukup holistik, yakni bertujuan untuk menyediakan tempat perlindungan yang nyaman dan aman, makanan, pelacakan anggota keluarga, dan pelayanan kesehatan terhadap para pengungsi yang baru tiba, dengan memberikan prioritas terhadap orang-orang yang tidak memiliki anggota keluarga, sakit, dan trauma (Global Shelter Cluster, 2016).

Secara lebih lanjut, tingginya jumlah pengungsi yang masuk di wilayah Eropa dan khususnya Jerman yang memberlakukan kebijakan *Open Door* ditindaklanjuti oleh pemerintah federal Jerman dengan menyediakan lebih banyak akomodasi. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap para pengungsi maupun pencari suaka. Dijelaskan dalam The Federal Government (2015) bahwa

pemerintah federal telah menyediakan tempat untuk masing-masing negara federal guna menerima 115.000 pengungsi. Selain itu, terdapat program yang diluncurkan oleh *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW). Program tersebut sejatinya adalah sebuah program yang dapat membantu otoritas lokal untuk membuat akomodasi atau tempat baru, mulai dari pembelian hingga pembangunan (The Federal Government, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan *Open Door* yang dikeluarkan oleh Angela Merkel direspon secara positif oleh pemerintah federal dengan memberikan bantuan berupa tempat perlindungan bagi para pengungsi maupun pencari suaka. Selain itu, negara bagian tentunya tidak dapat terlepas dari adanya tanggung jawab untuk memberikan fasilitas yang cukup baik terkait dengan tempat suaka. Dilansir oleh The Federal Government (2015), pada akhir bulan September pemerintah federal dan negara bagian menyetujui adanya tindakan ekstensif, termasuk janji pemerintah federal untuk menempatkan real estat federal yang sifatnya bebas biaya sewa. Ini berlaku khususnya untuk pusat penerimaan dan pusat tunggu bagi para pengungsi maupun pencari suaka. Terkait dengan hal tersebut, sejauh ini sudah terdapat 115.000 tempat telah disediakan di real estat yang dikelola oleh *Institute for Federal Real Estate*. Hal tersebut termasuk sekitar 32.000 tempat yang telah dikembalikan oleh *Bundeswehr* atau dirilis untuk digunakan bersama (The Federal Government, 2015).

Tidak hanya itu, pemerintah federal juga meningkatkan dana kompensasi yang dialokasikan untuk negara federal dalam periode tahun 2016 hingga 2019 mencapai 500 juta Euro per tahun. Dana tersebut

sejatinya adalah untuk membangun perumahan sosial. Tentunya hal ini menjadi suatu hal yang penting karena dapat menambah jumlah tempat-tempat perlindungan yang dapat digunakan oleh para pengungsi maupun pencari suaka. Selain itu, otoritas lokal juga melanjutkan untuk menerima bantuan yang dapat digunakan untuk menyediakan akomodasi bagi para pengungsi maupun pencari suaka. Terkait dengan hal ini, telah dijelaskan bahwa terdapat suatu program yang diluncurkan oleh *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW). Program tersebut senilai satu miliar euro secara total untuk mendukung pembangunan, konversi, pembelian, modernisasi dan pemasangan tempat penampungan pengungsi. Tidak hanya itu, program ini juga memberlakukan suku bunga nol persen dan akan dibekukan untuk jangka waktu sepuluh tahun. Diklaim bahwa pinjaman ini akan dapat membantu sekitar 500 otoritas lokal untuk menciptakan sekitar 100.000 tempat bagi para pengungsi (The Federal Government, 2015).

Angela Merkel dan pemerintah Jerman tidak hanya berfokus pada upaya perlindungan secara fisik terhadap para pengungsi maupun pencari suaka dalam krisis pengungsi yang terjadi di Eropa tahun 2015. Hal tersebut merujuk pada adanya rencana untuk mempersiapkan para pengungsi untuk dapat berintegrasi dengan pasar kerja yang ada di Jerman. Dijelaskan bahwa keputusan untuk membentuk unit khusus dengan membawa para ahli dari *Federal Employment Agency* dan juga *The Federal Office for Migration and Refugees* merupakan hasil diskusi antara Kanselir Angela Merkel dengan para pejabat terkait dari *Federal Chancellery*, *Federal Employment Agency*, dan mantan presiden dari *Federal Office for Migration and*

Refugees, Manfred Schmidt (The Federal Government, 2015). Unit khusus tersebut berfungsi untuk menghasilkan berbagai bentuk ide terkait dengan upaya untuk mempercepat proses penerimaan suaka. Sementara itu Menteri Federal untuk Urusan Ekonomi Sigmar Gabriel menjelaskan mengenai urgensi untuk memastikan bahwa pemrosesan permintaan suaka diatur dengan baik. Dalam pernyataannya, Sigmar Gabriel juga menekankan pentingnya untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban perang atau konflik dari negara asalnya.

"People coming from countries where they face neither war nor persecution will have to leave our country again, partly so that we have space for those who are genuinely persecuted" (The Federal Government, 2015).

Dalam pernyataan tersebut terlihat adanya skala prioritas yang diutamakan oleh pemerintah Jerman melalui Sigmar Gabriel. Bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Jerman difokuskan kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan perlindungan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah para pengungsi maupun pencari suaka dalam fenomena krisis pengungsi yang melanda kawasan Eropa karena dampak dari adanya perang atau konflik di negara asalnya.

Agenda Setting berbasis Gender dalam Kebijakan *Open Door* tahun 2015 oleh Angela Merkel

Angela Merkel dalam pemerintahan Jerman memiliki posisi yang cukup penting. Posisinya sebagai Kanselir Jerman tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah Jerman termasuk di dalamnya adalah kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, dikeluarkannya kebijakan *Open Door* pada tahun 2015 guna mengatasi krisis pengungsi di Eropa tidak dapat dihindarkan dari pengaruh maupun agenda-agenda yang dijalankan oleh Angela Merkel. Peneliti melihat bahwa kebijakan *Open Door* yang dikeluarkan oleh Angela Merkel memiliki *agenda-setting* yang didasarkan pada sensitivitas gender dan aspek-aspek feminis. Secara lebih lanjut, peneliti bahwa hal tersebut merujuk pada adanya *caregiver approach* dalam feminisme kultural. Pendekatan tersebut sejatinya berupaya untuk menjelaskan adanya sikap empati dan kompromi. Kondisi tersebut terlihat pada sosok perempuan dalam keterlibatannya dengan peran-peran sosial di masyarakat. Karakter-karakter tersebut juga terlihat dalam kondisi internasional di mana ada upaya untuk melakukan penerapan secara universal terkait dengan konsep-konsep pengasuhan.

Pendapat lainnya dijelaskan oleh Matthias Mayer (2018) bahwa Merkel telah menjadi "wajah" dari kebijakan terkait pengungsi yang dikeluarkan untuk mengatasi krisis pengungsi pada tahun 2015. Secara lebih lanjut, sebelum tahun 2015, gaya berpolitik yang dimiliki oleh Merkel cenderung pragmatis dan menggunakan langkah-langkah inkremental. Namun, hal tersebut kemudian berubah ketika Merkel menghadapi krisis pengungsi di Eropa pada tahun 2015. Mayer (2018) menjelaskan bahwa kebijakan *Open Door* yang dikeluarkan oleh Angela Merkel dipandang sebagai *personal project* walaupun terdapat berbagai bentuk pertentangan. Penjelasan tersebut kemudian cukup menunjukkan adanya

sensitivitas gender yang menjadi pertimbangan Angela Merkel dalam mengeluarkan kebijakan *Open Door* guna merespon fenomena krisis pengungsi tahun 2015.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan status Angela Merkel sebagai seorang wanita yang sekaligus menjadi Kanselir Jerman, Merkel dapat memanfaatkan posisi yang dimilikinya untuk menentukan agenda-agenda dalam kebijakan luar negeri yang dikeluarkan baik dalam situasi krisis maupun tidak. Dalam hal ini, agenda-agenda feminisme yang dimaksud adalah terkait dengan keamanan fisik dan kesetaraan dalam hal pekerjaan maupun kesempatan pendidikan (Rhode, 1994). Dengan membuka negara Jerman untuk para pengungsi yang tiba di kawasan Eropa, setidaknya dapat memberikan keamanan fisik bagi para pengungsi, utamanya adalah perempuan dan anak-anak karena memiliki kondisi yang cukup rawan untuk menjadi korban pelecehan seksual baik selama perjalanan meninggalkan negara asal maupun ketika sudah tiba di negara tujuan. Hal tersebut kemudian ditunjukkan dengan pernyataan Angela Merkel pada tanggal 15 September 2015 ketika melakukan pertemuan dengan pemerintah federal dan jajaran menteri Jerman:

“All in all, there was great unity that we want to provide protection for those who need it, and to do everything humanly possible to achieve this. On the other hand, however, it was also clear that those who have no perspective of staying cannot remain in our country – and this is the shared wish of the states and federal government. Now it's about once again achieving an

orderly and traceable process for dealing with the large number of refugees. We have spoken about accelerating the process. The federal government will also provide more details about this in the coming weeks. The federal states are also making significant efforts in this regard, for example to speed up the processing of cases at the administrative courts” (The Federal Government, 2015).

Dalam pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa Angela Merkel memiliki upaya cukup kuat untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap siapapun yang membutuhkan, atau dalam hal ini adalah pengungsi. Perlindungan terhadap pengungsi kemudian ditunjukkan dengan adanya upaya untuk dapat mempercepat proses pemberian status dan perlindungan terhadap pengungsi. Dengan menggunakan posisinya sebagai Kanselir Jerman, akan mempermudah Angela Merkel dalam menyebarkan pengaruh dan agenda-agenda yang esensial dengan agenda feminisme.

Tidak hanya agenda untuk memberikan keamanan fisik terhadap para pengungsi yang berusaha untuk diwujudkan oleh Angela Merkel, namun terdapat agenda lain yang berusaha untuk dilakukan yakni melakukan integrasi pengungsi terhadap kondisi sosial dan masyarakat Jerman. Integrasi kemudian menjadi upaya yang dilakukan oleh Angela Merkel dan pemerintah Jerman untuk dapat mengelola keberadaan pengungsi yang berada di Jerman. Hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan Angela Merkel pada 10 September 2015:

“Now it is a question of ‘rolling up our sleeves and getting rid of all the obstacles that are in the

way. 'Then we can live peacefully with the people coming to Germany. We cannot simply carry on as we have done to date. We must learn from the mistakes made in the 1960s and forge ahead rapidly with integration' (The Federal Government, 2015).

Selain itu, penulis melihat bahwa hal ini merujuk pada agenda feminisme yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Tentunya, upaya integrasi yang dilakukan juga mempertimbangkan rasio jumlah pengungsi laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya perempuan yang telah mendapatkan pekerjaan di Jerman setelah mendapatkan perlindungan, yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Sejalan dengan hal tersebut, Angela Merkel juga menaruh perhatian cukup besar terhadap kondisi pendidikan anak-anak yang menjadi pengungsi di Jerman. Hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan Angela Merkel dalam kunjungannya ke *Ferdinand Freiligrath School* yang berlokasi di Belin-Kreuzberg :

"It is worth making an effort for every single child," stressed the Chancellor. The children are very enthusiastic and willing to learn, she reported. "We want to give them a good future" (The Federal Government, 2015).

Anak-anak pun tidak terlepas dari perhatian Angela Merkel. Integrasi tidak hanya dilakukan dalam sektor pendidikan secara umum, tetapi juga berupaya untuk melakukan integrasi bahasa yang digunakan oleh pengungsi di Jerman agar dapat beradaptasi dengan masyarakat Jerman secara maksimal. Dijelaskan bahwa kemampuan bahasa menjadi

fondasi penting dalam melakukan integrasi anak-anak terhadap lingkungan baru mereka (The Federal Government, 2015). Ketika integrasi bahasa telah berhasil dilakukan, anak-anak nantinya dapat berkembang dalam masyarakat Jerman sehingga mempermudah mereka untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan.

Analisis Kebijakan *Open Door* Angela Merkel melalui Indikator Kebijakan Luar Negeri Sensitif Gender dan Feminisme

Guna melakukan analisis terhadap kebijakan *Open Door* yang dikeluarkan oleh Angela Merkel tahun 2015, penulis menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallstrom, dalam *Draft Action Plan for Feminist Foreign Policy 2015-2018* yang didasarkan pada empat pilar utama yakni *rights, realities and analysis, representation, dan resources*.

Pertama yakni terkait dengan indikator *rights* atau pemenuhan hak dasar. Pemenuhan hak dasar manusia dan kesetaraan hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan menjadi hal yang cukup esensial dalam kebijakan luar negeri sensitif gender. Hal tersebut cukup terlihat jelas ketika terjadi situasi krisis kemanusiaan pada suatu wilayah. Tidak jarang bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan perlakuan yang berbeda karena aspek-aspek kultural dengan menunjukkan dominasi laki-laki. Guna merespon tersebut, penting adanya untuk melihat kembali aspek-aspek kemanusiaan agar dapat memberikan respon yang tepat terhadap situasi krisis kemanusiaan. Pemenuhan hak dasar manusia dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan melalui

penegakan hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia. Terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak pengungsi laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, pemerintah Jerman telah memiliki mekanismenya. Dijelaskan dalam *Federal Office for Migration and Refugees* (2018) bahwa pusat penerimaan pengungsi dan pencari suaka bertanggung jawab untuk memberikan makanan dan tempat untuk tinggal sementara. Tidak hanya itu, pusat penerimaan juga dapat memberikan informasi mengenai kantor cabang terdekat. Selain itu, adanya *Asylum-Seekers Benefits Act* juga dapat melindungi kebutuhan dasar dan mengatur persediaan barang. Hal tersebut berlaku bagi para pencari suaka sesuai dengan *Asylum-Seekers Benefits Act* (Federal Office for Migration and Refugees, 2018). Sebelumnya, berita yang dilansir pada tanggal 31 Agustus 2015, Angela Merkel menekankan bahwa menjadi suatu hal yang penting untuk memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan dipatuhi oleh pengungsi.

Indikator berikutnya yakni *realities and analysis* melalui integrasi analisis gender. Dalam situasi krisis, laki-laki dan perempuan mendapatkan dampak yang berbeda. Hal ini kemudian berdampak pula pada perbedaan jenis-jenis bantuan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Terkait dengan adanya kondisi tersebut, analisis gender dipandang menjadi suatu hal yang cukup krusial dalam pemberian bantuan. Tentunya, dengan adanya integrasi analisis gender dalam respon terhadap situasi krisis, tentunya akan memberikan respon yang efektif dan efisien terhadap pihak-pihak yang terdampak krisis tersebut. Guna melihat hal tersebut pada kebijakan *Open Door* tahun 2015, penulis merujuk pada

tiga pengukuran terkait dengan implementasi pilar tersebut. Pertama yakni, memastikan adanya keterlibatan aktor internasional seperti PBB, institusi keuangan internasional, serta Uni Eropa yang secara sistematis terintegrasi dengan perspektif gender dalam setiap pelaporan dan analisis mengenai krisis kemanusiaan, utamanya dalam isu politik, ekonomi, keamanan, *human security*, dan bebas dari kejahatan (Mazurana & Maxwell, 2016). Kedua, membentuk satuan tugas atau kelompok kerja yang terdiri dari *senior humanitarian* dan personel lainnya yang relevan dari kementerian luar negeri dan bantuan internasional yang bertujuan untuk melakukan aktualisasi kebijakan luar negeri yang feminis dalam aspek bantuan kemanusiaan. Ketiga yakni memastikan populasi LGBTI dipertimbangkan dalam setiap respon darurat dan resiko bencana, dengan menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak LGBTI selama krisis. Dilansir dalam berita Euronews (2016) bahwa kelompok advokasi hak LGBT di Jerman, dalam hal ini adalah gay, telah membuka rumah baru di Berlin untuk para pengungsi dengan status homoseksual. Proyek tersebut diinisiasi oleh *Schwulenberatung Berlin* yang bekerja sama dengan Dewan Kota akan membuat tempat pengungsian untuk lebih dari 120 orang. Hal tersebut kemudian dengan diikuti dengan dibukanya tempat pengungsian di wilayah Nuremberg (Euronews, 2016). Dibukanya tempat pengungsian tersebut merujuk pada adanya laporan pelecehan di tempat pengungsian umum sehingga membuat mereka memutuskan untuk berpindah tempat. Dijelaskan oleh Stephan Jaekel, Kepala Departemen Pengungsi Homoseksual *Berlin Homosexual Counsel* bahwa:

“They are refugees like any other refugee, but they are also culturally isolated. And they have experienced a lot of violence. It starts with psychological violence... And it goes from verbal expressions of disapproval to discrimination up to physical violence with broken arms, broken noses, there've even been some attempted murders” (Euronews, 2016).

Adanya kerja sama yang baik antara kelompok kepentingan dengan Dewan Kota, tentunya akan memberikan respon situasi darurat yang baik pula. Terlihat bahwa Dewan Kota menaruh perhatian pula pada perlindungan hak-hak LGBTI yang berstatus sebagai pengungsi di Jerman.

Analisa berikutnya yakni melalui indikator pemenuhan representasi perempuan. sejatinya, dalam situasi dan kondisi apapun, laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan hak termasuk ketika menghadapi situasi krisis. Hak yang cukup penting ketika menghadapi situasi krisis tersebut salah satunya adalah hak untuk berpartisipasi dan mendapatkan informasi terkait dengan keputusan-keputusan yang memberikan dampak terhadap kehidupan mereka. Terkait dengan kondisi tersebut, menjadi penting untuk melihat representasi perempuan dalam sektor-sektor yang selama ini hanya didominasi oleh laki-laki seperti pengambilan kebijakan. Representasi perempuan dalam sektor-sektor tersebut diperlukan guna mewakili suara perempuan dan lebih memahami apa yang dialami oleh perempuan. Dalam hal ini, penulis merujuk pada tiga pengukuran utama terkait implementasi pilar ketiga. Pertama,

melanjutkan dan memperkuat upaya yang secara aktif menekankan keterlibatan perempuan sebagai aktor dalam proses perdamaian dan *peacebuilding* yang dapat membantu mereka untuk memberikan kontribusi berharga dalam proses perdamaian dan implementasinya. Kedua, untuk lebih memungkinkan partisipasi perempuan, dapat melakukan kerja sama dengan LSM internasional dan nasional, karena mereka sering ditempatkan dengan baik dan terampil dalam mewujudkan inklusi dan partisipasi yang bermakna dari perempuan. Ketiga, melakukan kerja sama kemanusiaan dengan badan-badan PBB dengan tujuan untuk memastikan partisipasi efektif dan bermakna dari perempuan, termasuk di dalamnya adalah UNFPA, UN Women, dan UNICEF (Mazurana & Maxwell, 2016). Dalam pilar ketiga ini, peneliti belum melihat adanya representasi pengungsi perempuan dalam ranah yang cukup berpengaruh. Hal tersebut merujuk pada durasi waktu yang tergolong masih cukup singkat, yakni kebijakan *Open Door* baru dijalankan pada tahun 2015.

Indikator terakhir yang digunakan adalah melalui indikator keadilan akses sumber daya. Tingginya jumlah penduduk yang terdampak krisis mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah bantuan kemanusiaan yang cenderung sedikit. Mazurana dan Maxwell (2016) menjelaskan bahwa pada tahun 2014, dana yang digunakan untuk memberikan bantuan kemanusiaan mencapai 24,5 miliar dolar AS. Namun, jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah populasi yang membutuhkan bantuan dimana pada tahun 2015 terdapat 82,5 juta populasi yang terkena dampak bencana

kemanusiaan. Melihat pada kondisi tersebut, transparansi dan keadilan terhadap akses sumber daya menjadi hal yang cukup krusial. Gender kemudian dilihat sebagai aspek yang dapat menanggulangi hal tersebut untuk menciptakan transparansi dan keadilan terhadap akses sumber daya antara laki-laki dan perempuan. Terkait dengan hal tersebut, Angela Merkel dan jajaran kabinet telah mencapai kesepakatan terkait *Integration Act* pada tahun 2016. Merkel menyatakan bahwa diadopsinya *Integration Act* tersebut dapat dikatakan sebagai batu loncatan. Hal tersebut tentunya ditujukan untuk dapat mempercepat integrasi. Merkel menjelaskan bahwa pencapaian tersebut menjadi hal penting karena akan membawa *Federal Office for Migration and Refugees* dan *Federal Employment Agency* untuk dapat melakukan koordinasi (The Federal Government, 2016). Kebijakan *Open Door* tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Angela Merkel kemudian direspon oleh Sigmar Gabriel, *Federal Economic Affairs Minister*, dengan menyusun *Integration Act* yang kemudian dikenal sebagai *Immigration Act 1.0* (The Federal Government, 2016).

KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa sensitivitas gender dan feminisme dari Angela Merkel memberikan pengaruh cukup besar terhadap dikeluarkannya kebijakan *Open Door* tahun 2015. Respon yang ditunjukkan oleh Angela Merkel dalam mengatasi krisis pengungsi pada tahun 2015 dapat dimaknai sebagai *agenda-setting* gender dan feminisme. Hal tersebut merujuk pada asumsi yang diberikan dalam pandangan feminisme kultural yang menekankan adanya

caregiver approach. Tingginya sikap empati dan kompromi yang dimiliki oleh perempuan akan memberikan implikasi tersendiri terhadap berbagai bentuk respon yang ditunjukkan oleh perempuan. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada lingkungan-lingkungan sosial semata, tetapi juga pada ranah yang lebih luas yakni internasional.

Angela Merkel memiliki kapasitas dan peluang yang cukup besar untuk dapat menentukan berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Jerman dalam menghadapi situasi krisis. Hal tersebut dikarenakan Angela Merkel memiliki posisi penting dalam pemerintahan Jerman, yakni sebagai kanselir. Kondisi-kondisi ini yang terlihat sebagai adanya upaya penerapan *agenda-setting* yang didasarkan pada aspek gender dan feminisme terkait dikeluarkannya kebijakan *Open Door* pada tahun 2015 dalam menghadapi krisis pengungsi di Eropa. Statusnya sebagai seorang perempuan dan posisinya sebagai Kanselir Jerman cukup kuat dalam mendukung adanya *agenda-setting* berbasis gender dan feminisme dalam menghadapi situasi krisis tersebut.

REFERENSI

- BBC. (2015). Migrants Crisis: Germany Seizes its Chance to Help. Diakses 30 Maret 2017 dari <http://www.bbc.com/news/world-europe-34148159>
- Engler, M. (2016). Germany in the Refugee Crisis: Background, Reactions, and Challenges. Diakses 18 Maret 2017 dari <https://pl.boell.org/en/2016/04/22/germany-refugee-crisis-background-reactions-and-challenges>
- Euronews. (2016). Shelter for Gay Refugees Opens in Berlin. Diakses

- 24 Maret 2018 dari
<http://www.euronews.com/2016/02/23/shelter-for-gay-refugees-opens-in-berlin>
- European Stability Initiative. (2017). *The Refugee Crisis through Statistics*. Diakses 19 Februari 2018 dari
<http://www.esiweb.org/pdf/ESI%20-%20The%20refugee%20crisis%20throug%20statistics%20-%2030%20Jan%202017.pdf>
- Federal Office for Migration and Refugees. (2018). *The Responsibel Reception Facility*. Diakses 24 Maret 2018 dari
<http://www.bamf.de/EN/Fluechtlingschutz/AblaufAsylv/MeldungAE/meldung-aufnahmeeinrichtung-node.html>
- Giovanna dell'Orto. (2017). *From Welcome Culture to Welcome Realism: Refugee Integration in Germany*. Diakses 15 Februari 2018 dari
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ifpol/thr_nhardt_dietrich_-_from_welcome_culture_to_welcome_realism_refugee_integration_in_germany.pdf
- Global Shelter Cluster. (2016). *Shelter Project 2015-2016*. Diakses 25 Juni 2018 dari
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/20161002_shelter_projects_summary_document_for_gsc_meeting.pdf
- Ivanova, D. (2017). *Hungarian Security Policy and the Migrant Crisis (2015-2017)*. *International Conference Knowledge-Based Organization*, 23(1).
<https://doi.org/10.1515/kbo-2017-0026>
- Juran, S., & Broer, P. N. (2017). *Data and Perspectives: A Profile of Germany's Refugee Populations*. Diakses 19 Februari 2018 dari
<http://daringlibrary.wiley.com/doi/10.1111/padr.12042/pdf>
- Knight, B. (2015). *Refugee Crisis Reignites Row over Berlin's Tempel of Airport*. Diakses 29 Juni 2018 dari
<http://www.dw.com/en/refugee-crisis-reignites-row-over-berlins-tempelhof-airport/a-18830800>
- Lee, E. (2015). *European Migration Crisis: Germany's Response*. Diakses 23 Maret 2017 dari
http://www.iewa.com/ftp/Publications/2015/Germany_migration_crisis_Germany%27s_response.pdf
- Mayer, M. M. (2018). *Germany's Response to the Refugee Situation: Remarkable Leadership or Fait Accompli? New Politik: German Policy*. Diakses 30 Maret 2017 dari
http://www.bfna.org/sites/default/files/publications/Newpolitik_German_Policy_Translated_web_0.pdf
- Mazurana, D., & Maxwell, D. (2016). *Sweden's Feminist Foreign Policy: Implications for Humanitarian Response*. Diakses 18 April 2017 dari
<http://fic.tufts.edu/publication-item/swedens-feminist-foreign-policy-implications-for-humanitarian-response/>
- Mushaben, J. M. (2017). *Wir Schaffen Das! Angela Merkel and the European Refugee Crisis*. *German Politics*, 26(4), pp. 516-533.
<http://www.tandfdaring.com/doi/full/10.1080/09644008.2017.1366988?needAccess=true>
- Muzalevskaya, M. (2016). *Europe's Refugee Crisis: A Comparative Analysis of Germany and France*. Diakses 28 Juni 2018 dari

- <https://www.researchgate.net/publication/309764197>
- Schmid, C. T. (2016). Germany's "Open Door Policy" in Light of the Recent Refugee Crisis. Diakses 18 April 2017 dari www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1046928/FULLTEXT01.pdf
- The Federal Government. (2015). Federal Government and States Meet on Refugees: Merkel 'A Massive Effort'. Diakses 22 Maret 2018 https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2015/09_en/2015-09-15-fluechtlinge-bund-laender_en.html?nn=709674
- The Federal Government. (2015). Integration and Education: Angela Merkel Finds Out First Hand about Refugee Assistance. Diakses 22 Maret 2018 dari https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2015/09_en/2015-09-10-merkel-bamf-schule_en.html?nn=709674
- The Federal Government. (2015). Migration and Asylum: Preparing Refugees For The Labour Market. Diakses 2 Juli 2018 dari https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2015/09_en/2015-09-18-fluechtlinge-kw38_en.html?nn=709674
- The Federal Government. (2015). Refugee and Asylum Policy: German Government Presents Overall Strategy. Diakses 2 Juli 2018 dari https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2015/09_en/2015-09-07-koalitionsausschuss-fluechtlinge-merkel-gabriel_en.html?nn=709674
- The Federal Government. (2015). Refugee Assistance: Federal Government Provides More Accommodation. Diakses 2 Juli 2018 dari https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2015/11_en/2015-11-04-kab-unterbringung-fluechtlinge_en.html?nn=709674
- The Federal Government. (2016). Cabinet Meeting Comes to A Close: Integration Act is A Milestone. Diakses 24 Maret 2018 dari https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2016/05_en/2016-05-25-meseberg-gabriel-merkel-mittwoch_en.html?nn=709674